

Partisipasi Dan Efektivitas Ekonomi Mikro Pinjaman Bergulir BUMDES di Desa Cilebut Barat Kabupaten Bogor

Participation and Effectiveness of Micro Economics Development of Revolving Loan BUMDes

Siti Ramlah Satia¹⁾ dan Dwi Sadono²⁾

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia,
Institut Pertanian Bogor, Darmaga Bogor 16680, Indonesia
E-mail: sitisatia69@yahoo.com, dwisadono@apps.ipb.ac.id

ABSTRACT

Village Owned Enterprise is an economic institution established in rural Indonesia and aims to develop the economy of rural communities. Rural economic development through BUMDes is inseparable from community participation. The purpose of this study is to analyze the relationship of internal and external factors with the participation of service business unit of revolving BUMDes program; and the relationship of participation with the level of effectiveness of micro economic development of BUMDes in West Cilebut Village. This research uses a quantitative approach supported by qualitative data. The number of respondents in this study were 45 respondents. The results showed that community participation in the revolving business unit of BUMDes program had low participation rate. Internal factors that have a relationship with participation is the level of income. External factors with the level of participation have a strong relationship that is the level of availability of facilities and infrastructure. This study also found that the effectiveness of the program is low. The level of participation with the effectiveness of the program that has a relationship is the goal of the program.

Keywords: BUMDes, Participation Level, Program Effectiveness, Revolving Loans

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa adalah sebuah lembaga ekonomi yang dibentuk di pedesaan Indonesia dan bertujuan mengembangkan ekonomi masyarakat desa. Pembangunan ekonomi masyarakat melalui BUMDes tidak terlepas dari partisipasi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan faktor internal dan eksternal dengan partisipasi penerima layanan unit usaha pinjaman bergulir program BUMDes; serta hubungan partisipasi dengan tingkat efektivitas pengembangan ekonomi kelompok kecil BUMDes di Desa Cilebut Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung oleh data kualitatif. Jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 45 orang responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam unit usaha pinjaman bergulir program BUMDes memiliki tingkat partisipasi rendah. Faktor internal yang memiliki hubungan dengan partisipasi adalah tingkat pendapatan. Faktor eksternal dengan tingkat partisipasi memiliki hubungan yang kuat yaitu tingkat ketersediaan sarana dan prasarana. Penelitian ini pun menemukan bahwa tingkat efektivitas program tergolong rendah. Tingkat partisipasi dengan tingkat efektivitas program yang memiliki hubungan adalah tujuan program.

Kata Kunci: BUMDes, Pinjaman Bergulir, Tingkat Partisipasi, Efektivitas Program

PENDAHULUAN

Fenomena kemiskinan selalu menjadi bahasan yang hangat dalam setiap diskusi baik di pemerintah maupun di masyarakat awam. Kemiskinan dengan berbagai standarnya akan selalu ditemui di belahan dunia manapun. Indonesia dengan sebaran penduduk yang sebagian besar berada di pedesaan juga tidak lepas dari kondisi kemiskinan. Badan Pusat Statistik (2016) mencatat terdapat 28,01 juta atau 10,86 persen jumlah penduduk miskin di Indonesia yang sebarannya hanya banyak terdapat di kawasan di pedesaan (14,11 persen). Kondisi kemiskinan yang

semakin lama semakin memburuk ini kemudian membuat pemerintah harus bertindak cepat dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di desa. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola daerahnya secara mandiri, salah satunya adalah melalui lembaga ekonomi yang berada di tingkat desa yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut UU No 32/2004, tentang Pemerintahan Desa mendefinisikan desa adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (2014) jumlah desa di Indonesia pada tahun 2011 baik yang berada di wilayah tepi laut maupun bukan jika dijumlahkan mencapai lebih dari 70 ribu desa.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 87 sampai pasal 90 menjelaskan mengenai BUMDes merupakan suatu badan usaha yang ada di desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Secara teknis BUMDes yang ada mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang mana ke depan desa mendapat peluang yang lebih besar untuk meningkatkan perannya dalam pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan. Dalam hal ini BUMDes dapat menjadi instrumen yang dioptimalkan perannya sebagai lembaga ekonomi lokal yang legal yang berada di tingkat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pendapatan desa dan mengurangi tingkat kemiskinan di daerah pedesaan.

Pengelolaan BUMDes dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat. Pengelolaan yang melibatkan masyarakat secara langsung diharapkan mampu mendorong perekonomian dengan memberdayakan masyarakat. Keterlibatan masyarakat secara langsung bertujuan agar setiap kegiatan-kegiatan atau program yang akan dilaksanakan akan sesuai dengan potensi desa, ketrampilan masyarakat dan kebutuhan masyarakat. Menurut Adismita (2006) terdapat beberapa alasan mengapa masyarakat perlu diajak berperan serta dan didorong untuk berpartisipasi yaitu: (1) Masyarakat memahami sesungguhnya tentang keadaan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat; (2) Masyarakat mampu menganalisis sebab dan akibat dari berbagai kejadian yang terjadi dalam masyarakat; (3) Masyarakat mampu merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi masyarakat; (4) Masyarakat mampu

memanfaatkan sumber daya pembangunan (SDA, SDM, dana, teknologi) untuk meningkatkan produksi dan produktifitas dalam rangka mencapai sasaran pembangunan masyarakat; (5) Dengan upaya meningkatkan kemampuan SDM-nya dan kemauan, sehingga dengan berlandaskan pada kepercayaan diri dan keswadayaan yang kuat mampu menghilangkan sebagian besar ketergantungan terhadap pihak luar. Merujuk pada pendapat Cohen dan Uphoff (1979) partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes dapat dibagi ke dalam beberapa tahapan atau tingkatan, yaitu: tahap pengambilan keputusan, tahap pelaksanaan, tahap menikmati hasil dan tahap evaluasi. Dari beberapa tahapan ini partisipasi masyarakat pada setiap tahapan sangat menentukan keberhasilan dari program yang telah dilaksanakan, setiap tahap partisipasi akan saling mempengaruhi tahap-tahap lain.

Hasil penelitian Latif (2014) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan di desa masih kurang maksimal, terutama dalam tahap pelaksanaan pembangunan. Kurang aktifnya masyarakat dalam tahapan pembangunan desa ini disebabkan masih kurang pemahannya masyarakat akan pentingnya partisipasi. Selain itu Potoboda (2011) menyebutkan bahwa dalam perencanaan program pembangunan, peran partisipasi masyarakat juga belum secara maksimal dilibatkan. Hasil penelitian Novia (2015) menemukan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan program pembangunan di desa masih rendah karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa tentang program yang dilaksanakan di desa. Kendala lain yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat juga karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan, pendidikan yang rendah, mata pencaharian masyarakat yang sebagian besar petani, jenis kelamin, dan pengetahuan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga baru di pedesaan yang berfungsi sebagai lembaga keuangan milik desa untuk membantu permodalan masyarakat desa. BUMDes salah satunya terdapat di desa Cilebut Barat. BUMDes yang dikelola di Desa Cilebut Barat telah berjalan selama tiga tahun dari tahun 2014-2017 dengan unit usaha yang terdiri dari parkir motor dan pinjaman bergulir. Dalam beberapa studi menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih kurang dalam beberapa program pembangunan. Oleh karena itu menjadi penting untuk diteliti bagaimana partisipasi

dan efektivitas pengembangan ekonomi kelompok kecil dalam unit usaha pinjaman bergulir program BUMDes.

PENDEKATAN TEORITIS

Tahapan Partisipasi

Menurut Cohen dan Uphoff (1979) dalam Nasdian (2006) membagi partisipasi ke beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut: (1) tahap pengambilan keputusan, yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Tahap pengambilan keputusan yang dimaksud di sini yaitu keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat perencanaan dan pelaksanaan suatu program, (2) tahap pelaksanaan yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan sebagai anggota proyek, (3) tahap monitoring dan evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya, (4) tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan, maka semakin besar manfaat proyek dirasakan, berarti proyek tersebut berhasil mengenai sasaran.

Faktor Internal dan Eksternal dalam Partisipasi

Menurut Slamet (2003) faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok di dalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau dicirikan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan. Secara teoritis terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan berpengaruh pada partisipasi.

Menurut Fauzi dan Sadono (2006) partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal adalah karakteristik individu yaitu: umur, tingkat pendapatan dan pengalaman berwirausaha. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu yaitu: penilaian

responden tentang kosultan, peranan pemerintah dan sarana prasarana yang diberikan.

Efektivitas Program

Menurut Budiani (2007) dalam mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel sebagai berikut : (1) ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang ditentukan sebelumnya, (2) sosialisasi program, yaitu kemampuan dalam menyelenggarakan program, dan dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi program dapat tersampaikan dengan baik kepada sasaran program dan masyarakat pada umumnya, (3) tujuan program, yaitu sejauhmana tujuan program yang direncanakan sesuai dengan hasil pelaksanaan program dan (4) Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah kegiatan selesai sebagai bentuk evaluasi.

Kerangka Pemikiran

Badan Usaha Milik Desa merupakan sebuah lembaga ekonomi yang dibentuk di pedesaan Indonesia. Pembentukan BUMDes ini tercantum dalam peraturan undang-undang yang ada di Indonesia, salah satunya adalah UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Pembangunan ekonomi lokal di pedesaan melalui BUMDes didasarkan pada kebutuhan masyarakat, potensi desa, dan kapasitas masyarakat desa. Pembangunan ekonomi masyarakat melalui BUMDes tidak terlepas dari partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses aktif dari masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program pembangunan. Dalam partisipasi masyarakat terdapat dua faktor yang diduga berhubungan dengan partisipasi masyarakat yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Menurut Slamet (2003) faktor internal adalah: usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan lamanya tinggal. Selain itu menurut Fauzi dan Sadono (2006) faktor eksternal adalah: peran pemerintah desa, tingkat ketersediaan sarana dan prasarana.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadikan partisipasi sebagai prasyarat keberhasilan dari program pembangunan yang dilaksanakan oleh BUMDes. Menurut Cohen dan Uphoff (1979) partisipasi memiliki beberapa tahapan yaitu: 1) tahap perencanaan program; 2) tahap pelaksanaan program; 3) tahap evaluasi program; dan 4) tahap memanfaatkan hasil. Partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan

BUMDes menunjukkan bahwa masyarakat terlibat aktif dalam pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat yang tinggi pada setiap tahapan partisipasi dalam pengelolaan BUMDes diduga berhubungan dengan keefektifan pengembangan ekonomi kelompok. Keefektifan pengelolaan BUMDes menunjukkan keberhasilan dari sebuah program BUMDes yang telah dilaksanakan. Efektivitas dari program pembangunan menurut Budiani (2007) dapat dilihat dari 1) Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang ditentukan sebelumnya; 2) Sosialisasi program, yaitu kemampuan dalam menyelenggarakan program, dan dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi program dapat tersampaikan dengan baik kepada sasaran program dan masyarakat pada umumnya; 3) Tujuan program, yaitu sejauhmana tujuan program yang direncanakan sesuai dengan hasil pelaksanaan program;. Kerangka penelitian yang dibangun dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1 Kerangka pemikiran hubungan antara tingkat partisipasi dan efektivitas pengembangan ekonomi mikro

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Cilebut Barat, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pendekatan

penelitian yang digunakan untuk menggali informasi, data dan fakta mengenai partisipasi dan efektivitas penerima layanan pinjaman bergulir program BUMDes ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung dengan data kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 45 responden. Pemilihan responden dilakukan dengan menggunakan teknik *simple random sampling* dengan cara mengacak nama responden menggunakan bantuan aplikasi *Microsoft Excel 2013*. Pemilihan terhadap informan dilakukan secara *purposive* (sengaja) dan jumlahnya tidak ditentukan.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui survei kepada responden, wawancara mendalam, dan pertanyaan terstruktur kepada informan, dan observasi langsung. Data sekunder dikumpulkan melalui kajian pustaka, data-data, informasi tertulis maupun literatur-literatur yang terkait dengan program BUMDes. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan dua jenis data yang diolah dan dianalisis. Data kuantitatif diolah dengan menggunakan aplikasi *Microsoft Excell 2010* dan SPSS for windows 21.0. Aplikasi SPSS 21.0 digunakan untuk membantu dalam uji statistik yang menggunakan *rank Spearman*. Uji korelasi *rank Spearman* digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar dua variabel yang berskala ordinal. Data kualitatif hasil dari wawancara mendalam dan observasi disajikan secara deskriptif. Seluruh data kualitatif dicatat dalam catatan lapangan. Data kualitatif berfungsi untuk memberikan keterangan yang lebih berupa kata-kata untuk mendukung data kuantitatif yang diperoleh melalui kuesioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Program BUMDes

Program BUMDes dibentuk di Desa Cilebut Barat pada tahun 2012, visi dari BUMDes Cilebut Barat adalah terwujudnya kelembagaan badan usaha milik desa yang sehat, berkembang, terpercaya dan mandiri. Berdasarkan Anggaran Dasar (AD) Badan Usaha Milik Desa pada Bab II pasal 2 ayat 4 menyatakan bahwa tujuan dari BUMDes Cilebut Barat adalah untuk : (1) Menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan melalui pembinaan usaha mikro guna memacu pertumbuhan usaha dalam rangka peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat, (2) memperkuat kelembagaan dan

memperluas jaringan kerjasama melalui berbagai potensi yang dimiliki masyarakat, bersinergi dengan lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga pemerintahan, (3) mengembangkan *linkage* program dengan lembaga-lembaga keuangan sebagai agen dalam memberdayakan usaha mikro dan (4) meningkatkan penghasilan asli Desa Cilebut Barat untuk peningkatan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat Desa Cilebut Barat.

Dalam mencapai tujuan dari BUMDes maka BUMDes Cilebut Barat melakukan beberapa kegiatan usaha salah satunya adalah kegiatan usaha pinjaman bergulir kepada penerima layanan dalam pengembangan usaha mikro. Jenis usaha pinjaman bergulir ini disesuaikan dengan keadaan Desa Cilebut Barat karena Desa tersebut merupakan desa perkotaan. Desa Cilebut Barat yang merupakan desa perkotaan ini menyebabkan jenis pekerjaan dan jenis usaha masyarakat beragam, sebagian besar masyarakat bekerja sebagai pedagang dan tukang ojek dibandingkan sebagai petani. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan dibuatnya unit usaha pinjaman bergulir sehingga mampu mengembangkan dan meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Cilebut Barat.

Sumber dana yang digunakan dalam usaha pinjaman bergulir kepada masyarakat diperoleh dari Kementerian Desa Tertinggal, Pembangunan Desa, dan Transmigrasi (Kemendes) dan usaha penitipan motor. Proses peminjaman yang dilakukan di Desa Cilebut Barat tidak memiliki persyaratan yang sulit bagi calon peminjam, seperti menggadaikan surat tanah namun hanya foto copy KTP, KK serta kesepakatan kedua belah pihak antara suami istri, dan sistem peminjamannya adalah dengan bunga cukup 10%. Selain itu jika terjadi keterlambatan untuk membayar pinjamannya, maka peminjam tidak terbebani oleh denda yang berlipat ganda atau bunganya masih tetap 10%. Adapun jika peminjam meninggal selama masih ada tunggakan, maka pihak keluarga (suami/istri) cukup membayar pokoknya saja.

Dalam aturan peminjaman penerima layanan dapat melakukan beberapa kali peminjaman modal usaha pada unit usaha pinjaman bergulir program BUMDes dengan persyaratan anggota tersebut telah terlebih dahulu melunasi pinjaman sebelumnya dan bagi anggota yang tidak melunasi peminjaman sebelumnya tidak akan diberikan pinjaman lagi. Sampai saat ini jumlah keseluruhan pinjaman modal usaha untuk penerima layanan BUMDes sebesar Rp

45.000.000-, dengan jumlah peminjam sebanyak 106 orang. Jumlah pinjaman modal pun bervariasi ada yang melakukan peminjaman sebanyak 1 kali, 2 kali, 3 kali sampai dengan 4 kali peminjaman. Kemudian untuk setiap kali peminjaman, diberikan pinjaman modal usaha sebesar Rp500.

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program Pinjaman Bergulir Di Desa Cilebut Barat

Secara keseluruhan dari hasil penelitian menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam unit usaha pinjaman bergulir di Desa Cilebut Barat tergolong rendah (62,2%). Kondisi ini dikarenakan dari keempat tahapan partisipasi yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap monitoring dan evaluasi, hanya pada tahap menikmati hasil sajalah yang memiliki tingkat partisipasi tinggi. Berdasarkan hasil penelitian hal ini dikarenakan masyarakat hanya mau berpartisipasi dalam tahap menikmati hasil yaitu memanfaatkan tersedianya dana pinjaman yang mudah dan relatif murah, tetapi pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi responden tidak banyak berpartisipasi.

1. Tahap perencanaan

Tahap perencanaan adalah keterlibatan masyarakat pada semua kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan program BUMDes unit usaha pinjaman bergulir, keikutsertaan masyarakat dalam tahap perencanaan agar masyarakat mengetahui gambaran dari keseluruhan kegiatan pengelolaan unit usaha pinjaman bergulir pada program BUMDes yang akan dilaksanakan. Berdasarkan pengamatan lapang partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan masih tergolong rendah (62,2%), hal ini dikarenakan sebagian besar penerima layanan modal usaha pinjaman bergulir saat ini adalah peminjam yang baru melakukan peminjaman sehingga banyak yang tidak mengikuti rapat perencanaan program. Selain itu saat rapat perencanaan program sebagian masyarakat jarang dan bahkan tidak pernah memberikan pendapat dalam rapat perencanaan program, mereka lebih sering menyetujui pendapat dari peminjam lain dan pengurus BUMDes. Masyarakat yang lain merasa bahwa pendapat mereka sudah terwakili oleh peminjam lain sehingga mereka tidak mau memberikan pendapat lagi dalam setiap rapat.

2. Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan sebab inti dari pembangunan

adalah pelaksanaannya. Pada tahap pelaksanaan masyarakat berpartisipasi secara langsung saat program sedang berlangsung. Berdasarkan pengamatan lapang partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan masih tergolong rendah(60,0%),. Dari hasil penelitian kondisi ini disebabkan oleh oleh jenis usaha masyarakat yang beragam sehingga sulit untuk memiliki waktu luang untuk bisa berkumpul bersama-sama dengan para peminjam lain dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing peminjam dalam mengembangkan usaha. Selain itu rendahnya partisipasi responden pada tahap pelaksanaan juga dikarenakan oleh masih banyaknya peminjam yang tidak menaati peraturan peminjaman seperti telat mengembalikan uang pinjaman. Dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan disebabkan oleh masyarakat yang tidak mengembalikan uang pinjaman karena merasa uang tersebut adalah milik pemerintah sehingga mereka tidak wajib untuk mengembalikan uang tersebut.

3. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Tahap monitoring dan evaluasi merupakan suatu kegiatan di mana masyarakat dapat menyampaikan saran dan kritik serta pendapat tentang solusi atas kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program BUMDes dalam unit usaha pinjaman bergulir sehingga menjadi perbaikan dalam pelaksanaan program selanjutnya. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi program sangat penting dilakukan karena baik masyarakat maupun pengurus dapat saling memberikan saran untuk kemajuan program BUMDes. Berdasarkan pengamatan lapang partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan masih tergolong rendah (66,7%). Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kondisi ini disebabkan oleh tidak adanya rapat monitoring dan evaluasi secara formal. Dari hasil wawancara dengan pengurus BUMDes, beliau menyampaikan bahwa walaupun tidak ada rapat monitoring secara formal namun monitoring dan evaluasi program BUMDes dilakukan secara personal kepada peminjam, namun dari hasil penelitian responden mengatakan bahwa mereka jarang bahkan tidak pernah bertemu dengan pengurus sehingga jarang untuk melakukan evaluasi tentang perkembangan usaha mereka. Selain itu menurut pengakuan mereka, mereka menyampaikan bahwa jarang ada kunjungan secara langsung dari pengurus kepada mereka untuk melihat usaha mereka. Kondisi-kondisi tersersebutlah yang menyebabkan tahap monitoring dan evaluasi tergolong rendah.

4. Tahap Menikmati Hasil

Pada tahap menikmati hasil atau manfaat, semakin besar manfaat yang diperoleh peserta berarti semakin berhasil program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam unit usaha pinjaman bergulir mengenai sasaran. Berdasarkan pengamatan lapang partisipasi masyarakat pada tahap menikmati hasil program tergolong sedang(42,2%). Kondisi ini menunjukkan bahwa responden dalam unit usaha pinjaman bergulir sudah cukup merasakan manfaat atau hasil dari program, walaupun secara keseluruhan mereka belum mampu mengembangkan usaha tetapi dengan adanya unit usaha ini dapat membantu kebutuhan mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Tingkat Efektivitas Program Pinjaman Bergulir di Desa Cilebut Barat

Berdasarkan pengamatan lapang menunjukkan secara keseluruhan program dari unit usaha pinjaman bergulir di Desa Cilebut Barat belum efektif. Hal ini dikarenakan dari ketiga faktor yang dapat menentukan efektivitas program hanya sosialisasi program saja yang jumlah terbanyak dari responden berada pada kategori tinggi. Kemudian ketepatan sasaran program dan tujuan program jumlah terbanyak berada pada kategori rendah.

1. Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran program adalah melihat sejauh mana tujuan program tepat pada sasaran yang sudah direncanakan. Berdasarkan pengamatan lapang ketepatan sasaran program tergolong rendah(53,3%). Kondisi ini dikarenakan beberapa responden yang melakukan peminjaman uang untuk modal usaha ternyata tidak memiliki usaha. Kemudian ada beberapa responden yang menggunakan uang pinjaman tidak sesuai dengan akad peminjaman, seperti menggunakan uang pinjaman bukan untuk mengembangkan usaha tetapi untuk membayar pengobatan dan biaya sekolah anak. Selain itu saat penelitian diketahui juga bahwa penyebab rendahnya ketepatan sasaran program dikarenakan oleh jumlah pinjaman modal usaha yang diberikan masih kurang sesuai dengan beberapa jenis usaha dari responden.

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi program adalah kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program agar informasi mengenai pelaksanaan program tersampaikan kepada responden. Berdasarkan pengamatan lapang

sosialisasi program tergolong tinggi (51,1%). Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi program BUMDes di Desa Cilebut Barat telah dilaksanakan dengan baik oleh pengurus BUMDes. Kondisi ini seperti yang ditemukan saat penelitian, saat penelitian sebagian besar responden menyampaikan bahwa mereka mengetahui adanya program BUMDes, serta telah mengetahui dengan jelas tujuan dari program BUMDes. Responden pun menyampaikan bahwa mereka mengetahui adanya program BUMDes dari sosialisasi yang dilakukan oleh pengurus BUMDes pada saat pengajian bulanan.

3. Tujuan Program

Tujuan program merupakan suatu ukuran untuk melihat sejauh mana kesesuaian tujuan program yang direncanakan dengan hasil pelaksanaan yang sudah dijalankan oleh masyarakat. Tujuan program dapat dilihat melalui tujuan utama dari adanya unit usaha pinjaman bergulir yaitu: meningkatkan kemandirian masyarakat, meningkatkan ekonomi masyarakat, dan membantu mengembangkan usaha masyarakat. Berdasarkan pengamatan lapang tujuan program tergolong rendah (51,1%). Hal ini menunjukkan bahwa unit usaha pinjaman bergulir belum mampu meningkatkan kemandirian masyarakat, meningkatkan ekonomi masyarakat, dan membantu mengembangkan usaha masyarakat. Hasil lapang menunjukkan bahwa Kondisi ini disebabkan oleh penggunaan uang pinjaman modal usaha yang tidak sesuai dengan akad peminjaman, masyarakat menggunakan uang pinjaman untuk hal lain dan tidak digunakan untuk mengembangkan usaha.

Analisis Hubungan Faktor Internal dan Eksternal dengan Tingkat Partisipasi

1. Hubungan Usia dengan Tingkat Partisipasi

Setelah dilakukan hasil uji rank Spearman diperoleh nilai korelasi antara variabel usia responden dengan tingkat partisipasi sebesar -0.172 dengan nilai signifikan hitung sebesar $0.258 > \alpha (0.05)$. Artinya hubungan kedua variabel adalah tidak nyata. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan nyata antara usia responden dengan tingkat partisipasi responden dalam program BUMDes di Desa Cilebut Barat. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Fitrianti (2014) yang menemukan bahwa terdapat hubungan antara faktor internal seperti usia dengan tingkat partisipasi masyarakat.

Berdasarkan pengamatan lapang diketahui bahwa terdapat dua faktor yang menyebabkan usia

responden tidak memiliki hubungan dengan tingkat partisipasi responden dalam unit usaha pinjaman bergulir program BUMDes. Kedua faktor tersebut adalah faktor kepemilikan usaha dan kebutuhan responden. Hal ini dikarenakan tingkat partisipasi responden ditentukan oleh kepemilikan usaha setiap pemanfaat program dan kebutuhannya yang tidak terbatas usia. Hal yang menjadi syarat mereka dapat berpartisipasi menjadi pemanfaat program BUMDes adalah ada atau tidaknya usaha dan kebutuhan dari masing-masing responden.

2. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Tingkat Partisipasi

Setelah dilakukan hasil uji korelasi *rank Spearman* diperoleh nilai korelasi antara variabel tingkat pendidikan responden dengan tingkat partisipasi sebesar 0.239 dengan nilai signifikan hitung sebesar $0.133 > \alpha (0.05)$. Artinya hubungan kedua variabel adalah tidak nyata. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan nyata antara tingkat pendidikan dengan tingkat partisipasi responden dalam unit usaha pinjaman bergulir di Desa Cilebut Barat. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Swedianti (2011) bahwa tingkat pendidikan memiliki hubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka masyarakat akan lebih cenderung berpartisipasi dalam program.

Berdasarkan pengamatan di lapang hal ini dikarenakan responden yang memiliki tingkat pendidikan rendah, sedang maupun tinggi semua memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi asalkan mereka memiliki usaha yang siap untuk dikembangkan. Berdasarkan persyaratan utama tersebutlah yang mendasari setiap responden untuk dapat berpartisipasi dalam unit usaha pinjaman bergulir. Selain itu hal lain yang membuat mereka berpartisipasi adalah karena adanya kebutuhan yang mendesak dalam keluarga yang membuat mereka harus melakukan peminjaman agar mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kondisi tersebutlah yang menyebabkan tingkat partisipasi mereka rendah karena dari keempat tahapan partisipasi hanya pada tahap menikmati hasil yaitu memanfaatkan hasil saja yang memiliki partisipasi tinggi dibandingkan tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

3. Hubungan Tingkat Pendapatan dengan Tingkat Partisipasi

Setelah dilakukan hasil uji korelasi *rank Spearman* diperoleh nilai korelasi antara variabel tingkat pendapatan responden dengan tingkat partisipasi sebesar 0.395 dengan nilai signifikan hitung sebesar $0.007 < \alpha (0.05)$. Artinya hubungan kedua variabel adalah nyata. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan nyata antara tingkat pendapatan dengan tingkat partisipasi dalam program BUMDes di Desa Cilebut Barat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Swedianti (2011) bahwa tingkat pendapatan memiliki hubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat maka masyarakat akan lebih cenderung berpartisipasi dalam program. Berdasarkan pengamatan lapang diketahui bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan responden setelah mengikuti unit usaha pinjaman bergulir program BUMDes maka mereka akan semakin berpartisipasi dalam unit usaha pinjaman bergulir program BUMDes. Terdapat hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat dengan tingkat pendapatan di mana semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka semakin tinggi tingkat pendapatannya hal ini dibuktikan oleh masyarakat yang meminjam uang dari unit usaha pinjaman bergulir program BUMDes memanfaatkan uang tersebut untuk mengembangkan usaha mereka yang secara otomatis ketika usaha mereka berkembang maka tingkat pendapatan mereka meningkat kecuali masyarakat yang baru terlibat dalam program BUMDes dan masyarakat yang tidak memanfaatkan uang pinjaman BUMDes sesuai akad peminjaman sehingga usaha mereka tidak berkembang atau belum berkembang.

4. Hubungan Lamanya Tinggal dengan Tingkat Partisipasi

Setelah dilakukan hasil uji korelasi *rank Spearman* diperoleh nilai korelasi antara variabel lamanya tinggal responden dengan tingkat partisipasi sebesar -144 dengan nilai signifikan hitung sebesar $0.344 > \alpha (0.05)$. Artinya hubungan kedua variabel adalah tidak nyata. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan nyata antara lamanya tinggal responden dengan tingkat partisipasi dalam program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cilebut Barat.

Berdasarkan pengamatan lapang hal ini dikarenakan lamanya tinggal penerima layanan modal usaha tidak membatasi mereka untuk meminjam uang di unit

usaha pinjaman bergulir. Penerima layanan yang merupakan warga asli atau pendatang sama-sama diberikan kesempatan untuk meminjam uang asalkan masyarakat tersebut memiliki usaha yang siap untuk dikembangkan dan bersedia menyerahkan foto copy KTP, KK kepada pengurus BUMDes. Hal ini seperti yang disampaikan oleh sekretaris BUMDes bahwa setiap masyarakat yang merupakan warga asli atau pendatang yang berada di Desa Cilebut Barat semuanya diberikan kesempatan yang sama untuk dapat melakukan peminjaman uang di unit usaha pinjaman bergulir asalkan masyarakat tersebut memiliki usaha.

5. Hubungan Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana dengan Tingkat Partisipasi

Setelah dilakukan hasil uji korelasi *rank Spearman* diperoleh nilai korelasi antara variabel tingkat ketersediaan sarana dan prasarana dengan tingkat partisipasi sebesar 338* dengan nilai signifikan hitung sebesar $0.023 < \alpha (0.05)$. Artinya hubungan kedua variabel adalah nyata. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat ketersediaan sarana dan prasarana dengan tingkat partisipasi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzi dan Sadono (2006) yang menemukan bahwa faktor eksternal tingkat ketersediaan sarana dan prasarana memiliki hubungan dengan partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil dari Tabel 28 dan didukung oleh hasil uji korelasi *rank Spearman* diketahui tingkat ketersediaan sarana dan prasarana memiliki hubungan dengan tingkat partisipasi anggota dalam unit usaha pinjaman bergulir program BUMDes. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya tingkat sarana dan prasarana yang tersedia maka semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakatnya di mana banyaknya sarana dan prasarana yang menunjang unit usaha pinjaman bergulir program BUMDes akan menunjang keberhasilan dari unit usaha pinjaman bergulir. Apabila sarana dan prasarana yang tersedia semakin mudah untuk dijangkau oleh masyarakat maka secara langsung tingkat partisipasi masyarakat akan meningkat karena ketermudahan penerima layanan untuk dapat mengakses unit usaha pinjaman bergulir salah satunya adalah sarana dari tempat pengembalian uang pinjaman. Jika tempat pengembalian uang pinjaman mudah untuk dijangkau oleh masyarakat secara otomatis masyarakat akan lebih mudah untuk mengembalikan uang pinjaman sehingga unit usaha pinjaman bergulir dapat berjalan dengan lancar.

Analisis Hubungan Tingkat Partisipasi Dan Tingkat Efektivitas Program

1. Hubungan Tingkat Partisipasi dengan Ketepatan Sasaran Program

Setelah dilakukan hasil uji korelasi *rank Spearman* diperoleh nilai korelasi antara variabel tingkat partisipasi dengan ketepatan sasaran program sebesar 190 dengan nilai signifikan hitung sebesar $0.212 > \alpha (0.05)$. Artinya hubungan kedua variabel adalah tidak nyata. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan nyata antara tingkat partisipasi responden dengan ketepatan sasaran program dalam program BUMDes di Desa Cilebut Barat. Berdasarkan pengamatan lapang hal ini dikarenakan adanya penyamaan jumlah pinjaman uang yang diberikan kepada masing-masing pemanfaat program yang tidak disesuaikan dengan jenis usaha dan kebutuhan modal usaha mereka. Selain itu hal lain yang membuat kedua variabel tersebut tidak memiliki hubungan adalah dikarenakan ada sebagian masyarakat yang mendapatkan pinjaman namun tidak memiliki usaha.

2. Hubungan Tingkat Partisipasi dengan Sosialisasi Program

Setelah dilakukan hasil uji korelasi *rank Spearman* diperoleh nilai korelasi antara variabel tingkat partisipasi responden dengan sosialisasi program sebesar 131 dengan nilai signifikan hitung sebesar $0.391 > \alpha (0.05)$. Artinya hubungan kedua variabel adalah tidak nyata. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan nyata antara tingkat partisipasi responden dengan sosialisasi program dalam unit usaha pinjaman bergulir di Desa Cilebut Barat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi responden tidak dipengaruhi oleh sosialisasi program BUMDes. Berdasarkan hasil lapang dari diketahui bahwa responden yang berpartisipasi dalam unit usaha pinjaman bergulir tidak didasarkan dengan semakin seringnya dilakukan sosialisasi program atau adanya sosialisasi program tetapi mereka berpartisipasi dalam unit usaha pinjaman bergulir program karena adanya kebutuhan dari responden yang mendesak dalam keluarga. Kondisi ini dapat terlihat dari keempat tahapan partisipasi hanya pada tahap menikmati hasil yaitu memanfaatkan dana pinjaman dari unit usaha pinjaman bergulir saja yang memiliki tingkat partisipasi tinggi dibandingkan tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap monitoring dan evaluasi.

3. Hubungan Tingkat Partisipasi dengan Tujuan Program

Setelah dilakukan hasil uji korelasi *rank Spearman* diperoleh nilai korelasi antara variabel tingkat partisipasi dengan tujuan program sebesar 340* dengan nilai signifikan hitung sebesar $0.022 < \alpha (0.05)$. Artinya hubungan kedua variabel adalah nyata. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan nyata antara tingkat partisipasi dengan tujuan program. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi dari penerima manfaat maka semakin tercapai tujuan program dana bergulir, yaitu terjadinya peningkatan ekonomi dari masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Tingkat partisipasi masyarakat dalam program pinjaman bergulir program BUMDes di Desa Cilebut Barat tergolong dalam kategori rendah, artinya masyarakat kurang berpartisipasi dalam program tersebut. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat hanya berpartisipasi pada tahap menikmati hasil, yaitu memanfaatkan pinjaman uang sedangkan pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap monitoring dan evaluasi program masyarakat kurang terlibat sehingga secara keseluruhan tingkat partisipasi masyarakat dalam program pinjaman bergulir BUMDes tergolong rendah. Faktor internal yang memiliki hubungan signifikan dengan tingkat partisipasi adalah tingkat pendapatan. Faktor internal yang tidak memiliki hubungan nyata dengan tingkat partisipasi adalah usia, tingkat pendidikan dan lamanya tinggal. Faktor eksternal yang memiliki hubungan nyata dengan tingkat partisipasi adalah tingkat ketersediaan sarana dan prasarana.

Tingkat efektivitas program dalam pinjaman bergulir di Desa Cilebut Barat tergolong dalam kategori rendah, artinya program tersebut belum efektif sehingga belum mampu mengembangkan usaha dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan dari ketiga faktor yaitu: ketepatan sasaran program, sosialisasi program dan tujuan program yang dapat menentukan efektivitas program hanya sosialisasi program saja yang termasuk dalam kategori tinggi, kemudian ketepatan sasaran program dan tujuan program berada pada kategori rendah. Tingkat partisipasi memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat efektivitas program pada aspek tujuan program.

Tingkat partisipasi tidak berhubungan nyata dengan tingkat efektivitas program pada aspek ketepatan sasaran program dan sosialisasi program.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat beberapa hal menurut peneliti yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan unit usaha pinjaman bergulir program BUMDes di Desa Cilebut Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang terlibat dalam unit usaha pinjaman bergulir BUMDes sehingga diharapkan ke depannya masyarakat lebih terlibat dalam setiap tahapan partisipasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Selain itu perlu dilaksanakannya rapat monitoring dan evaluasi secara formal dari pengelola BUMDes. Hasil penelitian ini pun menunjukkan bahwa tingkat efektivitas program dalam pinjaman bergulir BUMDes di Desa Cilebut Barat belum efektif. Hal ini dikarenakan ada beberapa masyarakat yang menggunakan uang pinjaman tidak sesuai akad peminjaman sehingga ke depannya pengelola BUMDes perlu lebih selektif dalam memilih calon peminjam. Jumlah pinjaman yang kurang memadai, tidak memisahkan keuangan usaha dan keuangan konsumtif keluarga, tidak adanya pendampingan pengelolaan usaha, dan tempat pengembalian uang pinjaman masih sulit dijangkau. Hal ini perlu diperbaiki oleh BUMDes. Selain itu ke dapannya perlu ada kepastian BUMDes menjadi lembaga koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [BPS] Badan Pusat Statistika. 2014. Jumlah Desa Menurut Provinsi dan Letak Geografis, 2003-2011 [internet]. [diunduh pada 2016 Januari 3]. Tersedia pada: <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1367>
- [BPS] Badan Pusat Statistika. 2016. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia. Jakarta (ID): BPS
- [Permendagri] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010
- [PP] Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
- [UU] Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 Tentang Desa
- [UU] Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Adisasmita R. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta : [ID]: Graha Ilmu
- Budiani NW. 2007. Efektivitas program penanggulangan pengangguran karang taruna “Eka Taruna Bakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*. 5(1): 16-22 [internet]. [diunduh 2017 Januari 3] tersedia pada : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/input/artical/viewFile/3191/2288>
- Fauzi A, Sadono D. 2006. Persepsi dan partisipasi masyarakat sasaran dalam program pengembangan usaha kelompok kecil (Kasus program pengembangan masyarakat PT Aneka Tambang, UPBE Pongkar di Desa Bantar Karet dan Desa Kalongliut Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor, Jawa Barat). *Jurnal Penyuluhan*. 03(2): 1-9 [internet]. [diunduh pada 2016 januari Oktober 1]; Tersedia pada: <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jupe/article/view/11439/0>
- Fitriyanti N. 2014. Partisipasi masyarakat dalam program nasional pemberdayaan masyarakat-mandiri di Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Latif A. 2014. Peran partisipasi masyarakat dalam peningkatan pembangunan desa di Kecamatan Posigadan. *Jurnal Madani*. 04(1): 1-17. [internet]. [diunduh pada 2017 januari Tersedia pada: [Http:// Journal. Iaingorontalo.Ac.Id/Index.Php/ Ma/Article/View/177](Http://Journal.Iaingorontalo.Ac.Id/Index.Php/Ma/Article/View/177)
- Nasdian FT. 2006. *Pengembangan Masyarakat (Community Development)*. Bogor (ID) : Institut Pertanian Bogor
- Novia. 2015. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan program alokasi dana desa Studi di Desa Semongan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau. *Sociodev*. 03(4): 1-7 [internet]. [diunduh pada 2016 januari Oktober 1]; Tersedia pada: <http://jurnafis.untan.ac.id>
- Potoboda AC. 2011. Partisipasi masyarakat dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dalam pembangunan di Desa Tarohan Kec. Beo Selatan. [internet]. [diunduh Pada 3 Januari 2016]. Tersedia pada: <Http://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Jurnaleksekutif/Article/Viewfile/7816/7379>
- Slamet M. 2003. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta [ID]: Sebelas Maret University Press
- Swedianti K. 2011. Partisipasi masyarakat dalam program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan (PNPM-MP). [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.